

ABSTRAK

Dadan Hidayat: Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak Yang Melakukan Perlawanan Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Bandung Tegallega Kota Bandung.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh KPP Pratama Tegallega, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Wajib Pajak akan tetapi KPP Pratama Tegallega tidak menjalankan semuanya dengan baik, Pasal 41 ayat (2) berbunyi “Pengajuan keberatan atau permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak” dan ayat (3) menjelaskan “Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan dalam Pasal 37 ayat (1) tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak” pada kenyataannya Surat Paksa tidak Diterima Wajib Pajak (WP) pada tahun 2023 sebanyak 872 dengan jumlah tunggakan pajak Rp.43,983,007,992 dan pada tahun 2024 sebanyak 144 wajib pajak dengan jumlah tunggakan pajak Rp.27,266,384,577, sehingga hal tersebut menjadi kerugian negara.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pada Kpp Pratama Bandung Tegallega, dan Untuk menganalisis akibat hukum Analisis akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega.

Kerangka pemikiran pada penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yang menjelaskan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, teori implementasi menjelaskan implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan, dan teori perpajakan menjelaskan pajak harus adil dan merata.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier, dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan penelitian ini Analisis peneliti terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sudah berjalan dengan baik akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang tidak membayar tunggakan dan sanksi yang diberikan hanya sanksi pemblokiran rekening, surat paksa tidak sampai kepada wajib pajak dikarenakan meninggal dunia, wajib pajak tidak bersedia menerima surat paksa dan jurusita mendapatkan ancaman dari wajib pajak. Akibat hukum Analisis akibat hukum bagi Wajib Pajak yang tidak mentaati Undang-Undang pada KPP Pratama Bandung Tegallega dapat dikenakan beberapa sanksi seperti sanksi berupa bunga dan denda atau bahkan Wajib Pajak dapat dikenakan Pidana.

Kata Kunci: Pajak, Tunggakan, Surat Paksa, Penagihan Pajak, Wajib Pajak

ABSTRACT

Dadan Hidayat: Tax Collection With A Commission Writing In Law Number 19 Of 2000 Concerning Tax Collection With A Commission Writing Against Taxpayers Who Resist At The Bandung Tegallega Pratama Tax Service Office (Kpp) Of Bandung City.

This research is motivated by tax collection with a letter of demand carried out by the Tegallega Pratama Tax Office, in accordance with the order of Law Number 19 of 2000 concerning Tax Collection with a Letter of Demand Against Taxpayers, however, the Tegallega Pratama Tax Office does not carry out everything properly, Article 41 paragraph (2) reads "Submission of objections or appeals does not delay the obligation to pay taxes and the implementation of tax collection" and paragraph (3) explains "The lawsuit as referred to in Article 34 paragraph (3) and in Article 37 paragraph (1) does not delay the implementation of tax collection" in reality the Letter of Demand was not received by Taxpayers (WP) in 2023 as many as 872 with a total tax arrears of Rp. 43,983,007,992 and in 2024 as many as 144 taxpayers with a total tax arrears of Rp. 27,266,384,577, so that this becomes a state loss.

The purpose of this study is to analyze the implementation of tax collection by means of a warrant under Law Number 19 of 2000 at the Bandung Tegallega Pratama Tax Office (KPP Pratama Bandung Tegallega), and to analyze the legal consequences for taxpayers who do not comply with the law at the Bandung Tegallega Pratama Tax Office (KPP Pratama Bandung Tegallega).

The conceptual framework of this study uses law enforcement theory, which explains the harmonization of the values outlined in the rules. Implementation theory explains policy implementation as one stage of the policy process. Taxation theory explains that taxes must be fair and equitable.

The method used in this research is descriptive analytical with a empiris legal approach. The data sources used to answer the problem formulation include primary, secondary, and tertiary data sources, using documentation and literature study as data collection techniques.

Based on this research, the researcher's analysis of the implementation of tax collection with a letter of coercion in Law Number 19 of 2000 has been running well, but there are several taxpayers who do not pay arrears and the sanctions given are only account blocking sanctions, the letter of coercion does not reach the taxpayer due to death, the taxpayer is not willing to receive the letter of coercion and the bailiff receives threats from the taxpayer. Legal consequences Analysis of the legal consequences for taxpayers who do not comply with the Law at the Bandung Tegallega Pratama Tax Office can be subject to several sanctions such as sanctions in the form of interest and fines or even the taxpayer can be subject to criminal penalties..

Kata Kunci: Taxes, Arrears, Writs of Enforcement, Tax Collection, Taxpayers